

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI TENTANG PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) DI DESA LAMBANGSARI KECAMATAN TAMBUN  
SELATAN KABUPATEN BEKASI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg)**

**Oleh :**

**BENNO ABDULLAH SUNARYO**

**201910110311455**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2023**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI TENTANG PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS  
LENGKAP (PTSL) DI DESA LAMBANGSARI KECAMATAN TAMBUN  
SELATAN KABUPATEN BEKASI**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg)**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Benno Abdullah Sunaryo

201910110311455

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
TENTANG PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)  
DI DESA LAMBANGSARI KECAMATAN TAMBUN SELATAN  
KABUPATEN BEKASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 88/PID.SUS-  
TPK/2022/PNBDG)**

Diajukan Oleh:

**BENNO ABDULLAH SUNARYO**

201910110311455

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Mei 2024

Pembimbing Utama

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,

**Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum**



Dekan,

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**BENNO ABDULLAH SUNARYO**

**201910110311455**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Sabtu 11 Mei 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum

Penguji II : Cholidah, SH., MH

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Benno Abdullah Sunaryo

Nim : 201910110311455

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LAMBANGSARI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS  
PLAGIASI



Malang, 06 Mei 2024

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BENNO ABDULLAH SUNARYO

NIM : 201910110311455

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LAMBANGSARI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 88/PID.SUS-TPK/2022/PNBDG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Mei 2024

  
Abdullah Sunaryo



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan bagi penulis dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TENTANG PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI DESA LAMBANGSARI KECAMATAN TAMBUN SELATAN KABUPATEN BEKASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg). Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya yang menjadi panutan bagi penulis karena atas segala perjuangannya untuk kemakmuran umat muslim kala itu saat ini penulis dapat merasakan nikmatnya iman, islam dan ihsan.

Proses menyelesaikan tugas akhir ini mengajarkan penulis tentang banyak hal, yakni sebuah perjuangan menggapai cita di tanah rantau, batu loncatan bagi penulis untuk menoreh masa depan gemilang, persembahan karya oleh Penulis yang terindah bagi keluarga besar Penulis dan tentang maha luasnya Ilmu Tuhan. Menyelesaikan tugas akhir ini merupakan suatu nikmat dari Tuhan sekaligus sebagai tanggung jawab penulis terhadap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak doa juga dukungan dari berbagai pihak. Rasa terimakasih tak terhingga kepada yang terkasih penulis ucapkan khususnya kepada:



1. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, cintai dan hormati Ayah Bambang Sunaryo tercinta dan Ibu Liance Fatimah, yang telah memberikan dukungan serta doa-doa yang dilantarkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi motivator dan inspirasi selama penulis mengemban ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Dr. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sangat baik, ikhlas dalam memberikan bimbingan, nasihat, saran, juga kritik yang membangun bagi penulis dan atas dedikasi beliau berdua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa fakultas hukum.

6. Terimakasih temen-teman saya yang turut serta memberikan dukungan dan nasihat kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tak henti-hentinya memberikan semangat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.



Malang, 07 Mei 2024

Benno Abdullah Sunaryo

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO</b> .....	ix
<b>ABSTRAKSI</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	12
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	12
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	13
<b>E. Kegunaan Penelitian</b> .....	14
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	15
<b>G. Metode Pengumpulan Data</b> .....	18
<b>H. Sistematika Penulisan</b> .....	19
<b>BAB II</b> .....	21
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	21
<b>A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI</b> .....	21
<b>B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang</b> .....	40
<b>C. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)</b> .....	42

D. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum .....	47
A1. Pengertian Kepastian hukum .....	47
B2. Teori Kepastian Hukum .....	48
C2. Dasar Hukum Tentang Kepastian Hukum .....	56
BAB III .....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	57
A. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor Perkara 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBDG ditinjau pasal 12 huruf e Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	57
B. Analisis Yuridis Normatif Nomor Perkara 88/Sus-TPK/2022/PNBdg tentang tindak pidana korupsi jika ditinjau dari asas kepastian hukum .....	126
BAB IV .....	138
PENUTUP .....	138
A. Kesimpulan .....	138
B. Saran .....	139
DAFTAR PUSTAKA .....	141



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Hamzah, Andi, Korupsi di Indonesia : Masalah dan Pemecahannya, (Jakarta, Sinar Grafika, 1984) dikutip dalam buku, Adam Chazawi, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2017) hlm. 1

Sudjito, PTSL Pensertifikatan Tanah secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang Bersifat Strategis, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 7.

I Ketut suardita, SH.,MH, pengenalan bahan hukum (PBH), Hal.3

Winarto Surahmat, Pengantar Metodologi Ilmiah, (Bandung: CV. Tarsito, 1982), hlm. 132

Hamzah, Dampak Berbahaya dari Korupsi Dalam Pengelolaan Proyeek Pembangunan, (Jakarta: Akademika Presindo), 1984), hal.3

Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Terhadap Sistem Hukum dan Pemberantasannya (bagian kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal 149

Syahroni, Maharso dan Tomy Sujarwadi, Korupsi Bukan Budaya Tetapi Penyakit, (Yogyakarta: Deepulish, Januari, 2018), hal.5

Evi Hartini, Tindak Pidana Koprusi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 5

Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 9

P.A.F Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Gratika, 2016),Hlm 7

Roni Wiyanto, (2012), Azas-azas Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Mandar Maju. hlm. 45.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 88

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 4

Henry Campbell, M.A, Black's Law Dictionary, (St, Paul, Minn: West Publishing Co, Sixth Edition, 1990),hal. 123

Sholehuddin, Penegakan Sistem Pidana Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia, serta menemukan Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 6

Komisi Pemberantasan Korupsi, Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan, KPK, Jakarta, 2009, hal. 7

Tri Karyanti, Yani Prihati, & Sinta Tridian Galih, Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia, (Yogyakarta: CV Budi Utama 2019), hal. 11

Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 23.

Chaerudin DKK, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 39

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2005, hal. 30

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 343-344

Herman Soesangobeng. 2012, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria, Yogyakarta: STPN Press. Hal. 7.

Boedi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, hlm 1

Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, Hal 136

Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 8.

Sidharta, Reformasi Peradilan Dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010). hlm. 3.

Nur Agus Susanto, "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus 'ST' Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012," Jurnal Yudisial Volume 7, no. 3 (2014): hlm. 217-229.

Bernard L. Tanya, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publising, 2013). hlm. 117.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, ed. Awaludin Marwan (Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2012). hlm. 20.

Moh. Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” in Bahan Pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009).

Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata,” Jurnal Dinamika Hukum Volume 12, no. 3 (2012): hlm. 482-488.

Inge Dwisvimiari, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum,” Jurnal Dinamika Hukum Volume 11, no. 3 (2011): hlm. 525-530.

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa mengenai keadilan ini dapat dijumpai pada buku Aristoteles yang berjudul *Rhethorica*, yang oleh orang Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa latin *ius suum cuique tribuere* atau dalam bahasa Indonesia “setiap orang mendapat bagiannya”. Akan tetapi, keadilan tidak boleh disamakan dengan persamaan. Keadilan, tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009). hlm. 151.

Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” Jurnal Konstitusi Volume 6, no. 1 (2009): hlm. 140-142.

Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, *Tujuan Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hal. 56

A. Karim Nasution. 1985. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III*. Jakarta. Tanpa Penerbit. Hlm. 136.



Ridwan dan Nurmalita Ayuningtyas Harahap. 2018. Hukum Kepegawaian. Yogyakarta. UII Press. Hlm. 16.

Ahmad Gufron dan Sudarsono. 1991. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 12

Sri Hartini, et al. 2014. Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 31-32.

Sumarno. 2020. Urgensi Etika Penyelenggara Negara, KAIS (Kajian Ilmu Sosial), Edisi No. 1, Vol. 1, Fakultas Ilmu Sosial Politik UMJ. hlm. 8.

Lamintang. 1979. Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Bandung. Pioner Jay. Hlm. 276

Teguh Prasetyo. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67

Adami Chazawi. 2016. Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm. 202.

Henry Campbell, M.A, Black's Law Dictionary, (St, Paul, Minn: West Publishing Co, Sixth Edition, 1990), hal. 123

Devi, C. 2021. Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Suap Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. Yustisia Tirtayasa, Vol. 1 No. 1, hlm. 73

Denny Sugono, dkk., 2008. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1004.

Wagiman. 2016. Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya

Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahamannya. *Jurnal Filasafat Hukum*. Vol. 1 No. 1, hlm. 48.

Benard Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung. Mandar Maju, hlm. 184.

Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta. Kanisius. hlm. 162.

JCT Simorangkir. 1983. *Hukum dan Konstitusi Indonesia*. Jakarta. Gunung Agung, hlm. 36

Fajar Nurhardianto, 2015. *Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia*, *Jurnal TAPIS*. Vol. 11 No. 1, hlm. 37.

## **INTERNET**

Adella Maria Rindler, 2020. "Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6

Sugali. "Pengertian Tindak Pidana Korupsi." Sugali dan Rekan, <https://sugalilawyer.com/pengertian-tindak-pidana-korupsi>. Di akses pada 14 febuari 2023.

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6  
TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP,

Diakses tanggal 13 Desember 2023 Dari

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/103713/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2018>

Utomo, Siwi. (2022). Indoensia Top. <https://superapp.id/blog/tips/cara-mengutip-dari-website>.

Kompos.com, "Kades Terjerat Pungli PTSL, Begini Nasib Pemerintah Desa Lamangsari". <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/08/20221911/kades-terjerat-pungli-ptsl-begini-nasib-pemerintahan-desa-lambang-sari>. Diakses pada 14 febuari 2023.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. "Patrice Rio Capella Uji Aturan Sanksi Suap dalam UU Tipikor". Juli 22, 2021, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17405>. Diakses pada tanggal 14 febuari 2023

## **PUTUSAN**

Petikan Putusan Nomor pekara: 88/Pid.sus-TPK/2022/PNBdg tanggal 25 Januari 2023

## **UNDANG-UNDANG**

Permen ATR/Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2018, Pasal 14 ayat (1).

Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).





## FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

### SURAT TUGAS

Nomor: E.2.e/718/FH-UMM/IX/2022

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Dr. Tongat, S.H., M.Hum  
Pembimbing I
2. Nama : Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum  
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Benno Abdullah Sunaryo  
NIM : 201910110311455  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Normatif Perkara Tindak Pidana Korupsi Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PNBdg)

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 16 Maret 2023

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 16 September 2022  
Dekan,



Dr. Tongat, SH., MHum



**Kampus I**

Jl. Babung 1 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 531 200 (Ruang)  
F. +62 341 400 430

**Kampus II**

Jl. Bungkaran Sukam No. 188 Malang, Jawa Timur  
P. +62 341 531 148 (Ruang)  
F. +62 341 282 062

**Kampus III**

Jl. Raya Tlogomas No. 248 Malang  
P. +62 341 264 310 (Ruang)  
F. +62 341 400 430  
E. webmaster@umm.ac.id



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125,126,188

**KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

- 1. Nama Mahasiswa : Beno. Abdulluh Sunarya
- 2. No. Induk Mahasiswa : 201910110311455
- 3. Judul Tugas Akhir : Analisis Yuridis Normatif Perkara Tindak Pidana Korupsi tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Lumajang Sari kec. Tambun selatan Kabupaten Bekasi, (STUDI PUTUSAN NOMOR 88/Pid-SUS-TPK/2022/PN Bdg)
- 4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir : .....
- 5. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Tomsat, S.H., M.Hum  
 2. TINUK Wati Cahyani, S.H., S.H.I., M.Hum
- 6. Jadwal bimbingan : Mulai ..... Tgl. s/d.....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	19 Januari 2023			Revisi BAB I Pembimbing 2
2.	26 Januari 2023			Revisi Bab I Pembimbing 2
3.	31 Januari 2023			Revisi Bab I Pembimbing 2
4.	20 Februari 2023			Ketemu saya BAB I Pembimbing 2
5.	21 Februari 2023			Revisi BAB I BAB I Pembimbing 2
6.	06 Juni 2023			Revisi BAB I Pembimbing 2
7.	13 Juni 2023			ACC BAB I Pembimbing 2
8.	21 Juni 2023			ACC BAB I Pembimbing 2
9.	04 Juli 2023			Revisi BAB I Pembimbing 2
10.	07 Juli 2023			Revisi Bab I Pembimbing 2
11.	10 Juli 2023			Revisi Bab I Pembimbing 2
12.	14 Juli 2023			ACC <del>Revisi</del> BAB I Pembimbing 2
13.	21 Agustus 2023			Revisi semi catatan BAB I Pembimbing 2

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
14	01 September 2023			Revisi BAB 2 Pemb. 1.
15	25 September 2023			Revisi BAB 2 Pemb. 2.
16	26 September 2023			Revisi BAB 2 Pemb. 1.
17	02 Oktober 2023			ACC BAB 2 Pemb. 1.
18	24 Januari 2024			Ketemu saya BAB 3 Pemb. 1.
19	5 Maret 2024			Revisi semi Ldtat BAB 3. Pemb 1
20	29 Februari 2024			Revisi semi catatan Pemb. 2.
21	28 Maret 2024			ACC BAB 3 Pemb. 1.
22	13 Maret 2024			Revisi BAB 3 Pemb. 2
23	18 Maret 2024			Revisi BAB 3 Pemb. 2
24	22 April 2024			ACC BAB 3 Pemb. 2.
25	3 Mei 2024			ACC BAB 4 Pemb. 1.
26	3 Mei 2024			ACC BAB 4. Pemb. 2.
27				

7. Tanggal selesai Menulis Tugas Akhir.....

8. Tugas Akhir Dinyatakan Siap di Ujikan.....

Pembimbing I Malang, .....  
Pembimbing II

.....

Mengetahui  
Dekan,

.....